

DAFTAR RUJUKAN

BUKU:

- Abbas, D. S. (2017). Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional. Prenada Media.
- Aditya, Pratama. (2023). Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa. CV. Mega Press Nusantara.
- Adrian, Sutedi. (2023). Sertifikat hak atas tanah. Sinar Grafika.
- Alexander, Wewo., Jannes. (2023). Buku Ajar Non Litigasi. Bandung: Widina Media Utama.
- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Ardiansyah, A. (2022). Kebijakan Hukum Pertanahan. Deepublish.
- Astarini, Sri. (2021). Mediasi Pengadilan. Penerbit Alumni.
- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu.
- Cahyani, T. D. (2022). Metode alternatif penyelesaian sengketa: Mediasi terhadap permasalahan hukum (dalam teori dan praktek) (Vol. 1). UMMPress.
- Hadrian, Endang. (2022). Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hutagalung, S. M. (2022). Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jogiyanto Hartono, M. (2018). Metoda pengumpulan dan teknik analisis data. Penerbit Andi.

- Kartikawati, Ratna. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. CV. Elvaretta Buana.
- Kolopaking, I. A. D. A. (2021). Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia. Penerbit Alumni.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Nugroho, S. A. (2019). Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Prenada Media.
- Qamar, Nurul & Rezah, Syah. (2020). Metode penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal. Makassar: Penerbit Social Politic Genius.
- Rasyid, M., Herinawati. (2015). Hukum Acara Perdata. Unimal Press.
- Santoso, Urip. (2015). Perolehan hak atas tanah. Jakarta: Prenada Media.
- Suhadi, Manan. (2020). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Media Cipta Perkasa.
- Susanti, D. O., & A'an Efendi. (2022). Penelitian Hukum: Legal Research. Sinar Grafika.
- Suwendra, I. W. (2018). Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan. Nilacakra.
- Theodorus, Lae. (2024). Lembaga Adat Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Sebuah Konsep Menuju Ius Constituendum. Penerbit K-Media.
- Triana, N. (2019). Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi. Kaizen Sarana Edukasi.
- Vijayantera, I. W. A., & I Nyoman Jaya Kesuma. (2022). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi Dan Litigasi). Unmas Press.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2022). Akibat hukum peralihan hak atas tanah waris berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 64-80.
- Anindito, T., Priyadi, A., & Awaludin, A. (2022). Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 23-32.
- Arsadi, I. P. P. S., Sudiatmaka, K., & Windari, R. A. (2018). Peran Desa Pakraman dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Desa Bungulan, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 21-32.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. (2021). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat Oleh Camat dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 905-916.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. (2021). Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 486-494.
- Hartana & Darmika, P. (2022). Upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sebagai jalur alternatif. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 327-336.
- Hartana & Suriati, N. K. (2020). Penyelesaian sengketa tanah adat Kabupaten Buleleng Bali. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 219-229.
- Hutabarat, H. N., Sitohang, E. W., & Siambaton, T. (2021). Peran badan pertanahan nasional dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah. *Jurnal Hukum*, 10(1). 61-68

- Hutasoit, B., Adnyani, N. K. S., & Dantes, K. F. (2021). Eksistensi notaris sebagai mediator sengketa kenotariatan ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (studi kasus kantor notaris di Kota Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 405-415.
- Ilyas, I., Abbas, S., & Jauhari, I. (2017). Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Syiah Kuala Law Journal, 1(1), 83-100.
- Kurniati, Nia. (2016). Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Sosio Humaniora*, Vol.18. 207-217
- Maharani, N. (2018). Akar konflik pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2).
- Mahardika, S., & Risnawati, A. K. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Non Litigasi. *Jurnal Rechten*, 4(1). 13-19
- Mahesa, K. H., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan hukum dalam jual beli tanah di bawah tangan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 115-124.
- Mayasari, I. D. A. D., & Rudy, D. G. (2021). Analisis yuridis tentang proses mediasi dalam alternatif penyelesaian sengketa tanah adat di Bali. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 15(2).
- Negara, I. K. Y. A, Adnyani, N. K. S., Sudiatmaka, K. (2020). Proses penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menangani sengketa tanah melalui mediasi (studi kasus Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B). *Jurnal Pacta Sunt Servanda*.
- Nopiandri, K. (2018). Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan dari Perspektif Teori Sistem Hukum. *Jurnal Legal Reasoning*, 1(1), 48-67.

Rosy, k. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah adat Setra Karang Rupit di Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.

Santoso, M., Hakim, Ibnu., Hartoyo. (2023). Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. *Al Ahkaam: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*.

Sukmawati, P. D. (2022). Hukum agraria dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89-102.

Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis yuridis hak ulayat terhadap kepemilikan tanah adat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 112-121.

SKRIPSI

Al Faiz, G. (2023). Peran mediator dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di kantor pertanahan Kota Makassar, Universitas Muslim Indonesia).

Rahmad, S. S. (2014). Pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan secara nonlitigasi (Studi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, Universitas Medan Area).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 204, Tambahan Lembar Negara Nomor 3643.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

